



**PENGEMBANGAN DESA WISATA ORGANIK DI DESA LOMBOK KULON
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Development of Organic tourism Village in Lombok Kulon Village Sub District
Wonosari District Bondowoso)*

SKRIPSI

Oleh

Dinda Anisa Sriharini

NIM 130910201049

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**PENGEMBANGAN DESA WISATA ORGANIK DI DESA LOMBOK KULON
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Dinda Anisa Sriharini

NIM 130910201049

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ayahanda Suharto (Alm) dan Ibunda Sri Fajarna, serta Ayahanda Spto yang termulia, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah luntur, dukungan moril dan materil, serta barokah doa yang selalu menyertai di setiap langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan;
2. adik dan kakakku Recavery Dwi Wulandari dan Asseta Eka Maulana serta keluarga di Bondowoso yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya;
3. guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, serta para Ustadz yang telah menuntun membimbingku ke arah yang terang penuh ilmu pengetahuan.
4. almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut (29):6)

“Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah menunda ijabah doa itu. Dialah yang menjamin ijabah doa itu menurut pilihan-Nya padamu, bukan menurut pilihan seleramu. Kelak pada waktu yang dikehendaki-Nya bukan menurut waktu yang engkau kehendaki.”

(Ibnu Atha’ilah)

“Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar harimu menjadi tentram karenanya. Dan keinginanmu ini hanyalah dari Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(Al-Anfar (8);10)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Anisa Sriharini

NIM : 130910201049

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Pengembangan Desa Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Dinda Anisa Sriharini

NIM 130910201049

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN DESA WISATA ORGANIK DI DESA LOMBOK KULON
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh

Dinda Anisa Sriharini

130910201049

Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Ardiyanto, M.Si**

Pembimbing Anggota : **Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pengembangan Desa Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso karya Dinda Anisa Sriharini telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 09 Oktober 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si ()
NIP 195607261989021001
2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP 197903032005011001
3. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP 196306061988021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso; Dinda Anisa Sriharini, 130910201049; 2017: xvii + 115 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perkembangan Desa Wisata Organik dalam mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Mulai dari perkembangan pariwisata, sumber daya manusia, akomodasi, promosi dan lainnya. Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Salah satu mengembangkan potensi yang ada melalui desa wisata. Agar desa wisata tiap tahunnya bisa meningkatkan produktifitasnya, desa wisata harus melakukan perkembangan disegala aspek yang dimiliki. Salah satunya pengembangan desa wisata ini harus memperlihatkan kemampuan sumber daya manusia dan tingkat penerima masyarakat setempat karena menjadi faktor utama pengembangan dilakukan. Hal yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Desa Wisata dibentuk tujuannya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi pariwisatawan yang berkunjung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap mafaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di daerah Bondowoso, lebih tepatnya di Desa Wisata Organik Lombok Kulon. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi , pemeriksaan

sejawat melalui diskusi dan kecukupan referensi. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengembangan desa wisata dilakukan dengan menggerakkan masyarakat sekitar dan Kelompok Sadar Wisata Desa Lombok Kulon. Pada tiap tahunnya perkembangan di Desa Lombok Kulon semakin meningkat seperti bertambahnya akomodasi, paket pariwisata dan jumlah pengunjung. Pengembangan yang dilakukan tidak luput dari bimbingan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dari awal dibangunnya Desa Wisata Organik. Dukungan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang meliputi pembinaan guide untuk para Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Organik, pembinaan kepada ketua pengelola, serta promosi untuk memperkenalkan Desa Wisata Organik kepada masyarakat luas. Tidak hanya dinas terkait yang mendukung pengembangan Desa Wisata Organik, masyarakat juga ikut serta mendukung pengembangan Desa Wisata Organik dengan menerapkan pertanian organik (tanaman hortikultura) di rumah mereka masing-masing, menyediakan *homestay* tradisional untuk pengunjung yang ingin bermalam di Desa Wisata Organik dan masyarakat Desa Lombok Kulon mayoritas sudah mengerti tentang dampak positif dari perkembangan Desa Wisata Organik. Selain factor-faktor pendukung, ada juga factor penghambat dalam perkembangan Desa Wisata Organik. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang telah menanggapi Desa Wisata Organik sudah bisa mandiri dalam menjalankan desa wisatanya, dinas tersebut mulai kurang maksimal dalam membina POKDARWIS Desa Wisata Organik Lombok Kulon. Walaupun Desa Wisata Organik sudah bisa mandiri, diharapkan dinas terkait tetap maksimal dalam membina POKDARWIS Desa Wisata Organik untuk mengembangkan potensi yang ada, serta masyarakat semakin banyak yang mendukung Desa Wisata Organik agar lebih baik lagi dalam pengelolaan desa wisatanya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
6. Syahid selaku Kepala Desa Lombok Kulon dan seluruh perangkat Desa Lombok Kulon yang telah berkenan memberi ijin untuk melakukan penelitian di Desa Wisata Organik
7. Baidhawi selaku ketua POKDARWIS Desa Wisata Organik dan para informan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan skripsi ini;
8. Ayahanda Suharto (Alm), Ayahanda Sapto dan Ibunda Sri Fajarna beserta keluarga besar yang ada di Bondowoso yang senantiasa memberikan segala

bentuk dukungan, motivasi dan doa selama menempuh pendidikan di Universitas Jember sampai terselesaikannya skripsi ini;

9. Sahabat saya Dian Isna Selviyati, Dwi Putri Desiyanti dan Rofidah Iman Sari yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga terselesaikan skripsi ini;
10. Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kasih sayang khususnya teman-teman konsentrasi Administrasi Pemerintah Daerah 2013 (APD13).
11. Seluruh teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol (UKMF LIMAS) yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk berproses;
12. Teman KKN 130 OYE yang telah memberikan dukungan dan doa;
13. Keluarga Besar Kos Gremenyon yang telah memberikan dukungan dan memberikan nilai kekeluargaan dan kebersamaan;
14. Semua sahabat dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga budi baik yang telah diberikan semua pihak yang berperan dan membantu terselesaikannya skripsi ini mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 9 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Dasar	12
2.2 Pengertian Otonomi	13
2.3 <i>New Public Service</i>	15
2.4 Pemerintah	21
2.5 Desa Wisata	23
2.5.1 Pengembangan Desa Wisata	28
2.6 Potensi	35
2.7 Pengembangan Potensi	39

2.8 Pengembangan Destinasi Pariwisata	40
2.9 Pertanian Organik	45
2.7 Kerangka Berpikir	47
BAB 3. METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Tempat Penelitian	50
3.3 Data dan Sumber Data	50
A. Data Primer	51
B. Data Sekunder	51
3.4 Penentuan Informan Penelitian	53
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	55
3.5.1 Observasi	56
3.5.2 Dokumentasi	57
3.5.3 Wawancara	58
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	59
3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan	60
3.6.2 Ketekunan Pengamatan	60
3.6.3 Triangulasi	61
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	61
3.7.1 Reduksi Data	62
3.7.2 Penyajian Data	63
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	63
3.8 Prosedur Penelitian	63
A. Tahap Pra-lapangan	64
B. Tahap Terjun ke Lapangan	64
C. Tahap Pasca Lapangan.....	64
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	65

4.1.1 Kabupaten Bondowoso	65
4.1.2 Destinasi Desa Wisata Organik Lombok Kulon	70
a. Sejarah Desa Wisata Organik Lombok Kulon	70
b. Profil Desa Wisata Organik Lombok Kulon	70
4.2 Hasil Penelitian	72
4.2.1 Pengembangan Potensi Desa Wisata Organik Lombok Kulon	72
4.2.2 Aktifitas dan Produk Desa Wisata Organik	85
4.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung	95
4.3 Pembahasan Pengembangan Desa Wisata Organik Lombok Kulon	101
BAB 5. PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.2 Data Kunjungan Wisatawan per Objek Wisata Kabupaten Bondowoso	5
2.1 Karakteristik-karakteristik <i>New Public Service</i>	18
3.1 Data dan Sumber Data	52
3.2 Daftar Nama Informan	55
3.3 Daftar Informasi yang dibutuhkan dan Teknik Pengumpulan Data	58
3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	60
4.1 Daftar Wisata Kuliner	91
4.2 Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	102
4.3 Bentuk Kerjasama Desa Wisata Organik Lombok Kulon	103
4.4 Promosi yang dilakukan Desa Wisata Organik	104
4.5 Kegiatan Desa Wisata Organik Lombok Kulon	105
4.6 Pembinaan untuk Desa Wisata Organik	106
4.7 Kerjasama antara Universitas dan Desa Wisata Organik	106
4.8 Penginapan di Desa Wisata Organik Lombok Kulon	107
4.9 Rekreasi yang ada di Desa Wisata Organik Lombok Kulon	107
4.10 Kegiatan Pendidikan Desa Wisata Organik	107
4.11 Kegiatan Penelitian Desa Wisata Organik	108
4.12 Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Organik	108
4.13 Kegiatan Promosi Desa Wisata Organik	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Potensi Daerah	36
2.10 Kerangka Berpikir	47
3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	62
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bondowoso	66
4.2 Peta Pariwisata Kabupaten Bondowoso	67
4.3 Kunjungan Pariwisata Kabupaten Bondowoso Periode 2015-2017	68
4.4 Kunjungan Desa Wisata Organik 2015-2017	69
4.5 Struktur Organisasi Desa Wisata Organik	75
4.6 Wisata Edukasi (Belajar di Rumah Organik)	87
4.7 Klinik Organik <i>by</i> Bang Bai	88
4.8 Kegiatan <i>English Club</i>	90
4.9 Kujungan Wisata Kuliner	92
4.10 Wisata Tubing	93
4.11 Promosi di Media Sosial	98

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Pedoman Wawancara
- b. Sesi Wawancara
- c. Dokumentasi Lokasi Desa Wisata Organik Lombok Kulon Sebelum Dikembangkan
- d. Dokumentasi Lokasi Desa Wisata Organik Lombok Kulon Setelah Dikembangkan
- e. UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- f. Surat Rekomendasi Bupati
- g. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- h. Akta Notaris Pendirian POKDARWIS Desa Wisata Organik Lombok Kulon
- i. Data Pengunjung Obyek dan Daya Tarik Wisata 2015-2017
- j. Surat Rekomendasi Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- k. Surat Rekomendasi penelitian dari BAKESBANGPOL
- l. Surat Rekomendasi penelitian dari Dinas Pariwisata, Pemudan, dan Olahraga

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam ekonomi dunia. Apabila sektor pariwisata berkembang atau mundur maka banyak banyak negara yang akan terpengaruh secara ekonomis. Kegiatan pariwisata hakekatnya merupakan kegiatan dilakukan secara suka rela tanpa paksaan untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Dalam perkembangannya industri pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Di Indonesia terkenal dengan potensi pariwisatanya yang beraneka macam salah satunya kekayaan alamnya yang dapat menjadi potensi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Agar menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan, destinasi tersebut harus terus mengembangkan kepariwisataannya. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Sejalan dengan dinamika, gerak pengembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan, desa wisata, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Senjata utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah.

Menurut Wahab (1996:103) Indonesia memiliki potensi wisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan keuangan negara dalam waktu yang lebih singkat daripada pertanian dan industri

migas. Perkembangan ekonomi akan tumbuh ketika terdapat industri pariwisata yang memicu produksi usaha baru, perluasan bidang usaha lainnya, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Pariwisata juga memberi peluang besar terhadap perekonomian untuk masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap daerah mempunyai kewenangan luas untuk memanfaatkan sumber daya alam daerahnya. Serta menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi pemerintah daerah untuk dikembangkan, hal tersebut tentunya dapat menjadi pilihan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 3, maka Kabupaten Bondowoso yang memiliki potensi disektor pariwisata sebagai urusan pemerintah yang dapat meningkatkan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat.

Sektor pariwisata salah satu urusan pemerintahan karena berpotensi untuk meningkatkan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam, keunikan budaya dan tradisi yang menjadi salah satu potensi yang unggul disetiap daerah untuk dikemas menjadi lebih baik lagi dan menjadi nilai jual tinggi. Kabupaten Bondowoso secara geografis merupakan Kabupaten yang berada di wilayah bagian timur Provinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7°50'10" sampai 7°56'41" Lintang Selatan dan 113°48'10" sampai 113°48'26" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4% daratan tinggi 24,9% yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan, dan dataran rendah 30% dengan berbagai potensi produk hasil pertanian. Keberadaan posisi geografis Kabupaten Bondowoso tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam yang bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Sumber

Daya Alam yang berpotensi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, mulai dari wisata pegunungan, wisata air terjun, wisata budaya, dan desa wisata.

Salah satu pembangunan kepariwisataan dengan diterapkan adanya desa wisata. Menurut Nuryanti (1993) Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Agar desa wisata tiap tahunnya bisa meningkatkan produktifitasnya, desa wisata harus melakukan perkembangan disegala aspek yang dimiliki. Salah satunya pengembangan desa wisata ini harus memperlihatkan kemampuan dan tingkat penerima masyarakat setempat dikembangkan menjadi desa wisata tersebut. Hal yang dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Desa Wisata dibentuk tujuannya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi pariwisata yang berkunjung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap mafaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa wisata dapat diketahui seperti sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat;
- b) pengembangan fisik yang diajukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa;
- c) memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian;
- d) memberdayakan masyarakat desa; dan
- e) memperlihatkan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan.

Tentunya pengembangan industri kepariwisataan dalam hal ini adalah desa wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah. Antara lain kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah. MacIntosh (dalam Pitana dan diarta, 2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat, dalam proses menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya. Pemanfaatan yang dimaksud seperti memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada dimana potensi tersebut dirangkai menjadi satu daya tarik wisata. Pemanfaatan kekayaan dan potensi wisata untuk pengembangan produk wisata menjadi salah satu Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Banyak juga destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat sekitar lokasi. Salah satu titik destinasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah objek desa wisata organik yang terletak di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari. Desa wisata organik yang mengangkat tema pertanian organiknya menjadi salah satu tujuan wisata favorit penduduk Bondowoso dan sekitarnya. Sistem pertanian organik memiliki beberapa kean konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia, keunggulan pertama secara umum para petani yang menerapkan sistem organik mengaku bahwa sistem pertanian yang berwawasan lingkungan ini memberikan keuntungan finansial yang lebih besar dibandingkan sistem pertanian konvensional (Herawati, Hendrani, dan Nugraheni, 2014). Hasil pertanian organik dihargai lebih tinggi di pasar dibandingkan dengan hasil pertanian konvensional. Sementara biaya pertanian organik dan pertanian konvensional tidak berbeda jauh. Itulah sebabnya, pertanian organik dapat diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian, yang pada akhirnya dapat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Alasan itulah yang menjadikan desa wisata di Lombok Kulon mengangkat tentang pertanian organiknya. Selain menawarkan pertanian organiknya, Desa Wisata Organik menawarkan

pemandangan indah, wisata tubing yang menjadi salah satu alasan wisatawan berkunjung ke lokasi. Meskipun masih tergolong baru menjadi desa wisata, Desa Wisata Organik memiliki intensitas pengunjung yang tidak kalah dengan wisata lain di Kabupaten Bondowoso. Pariwisata ini dapat menarik pengunjung yang berada di daerah maupun luar negeri. Berikut data kunjungan wisata Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.2 data kunjungan wisatawan per objek wisata Kabupaten Bondowoso tahun 2017 (Januari-Juni)

No.	Nama Objek Wisata	Wisnus	Wisman
1.	Kawah Ijen	43.219	8.850
2.	Kawah Wurung	17.419	665
3.	Air Terjun Gentongan	2.675	31
4.	Patirana P28	13.695	-
5.	Pemandangan Arak-Arak	10.188	2
6.	Air Terjun Tancak Kembar	2.624	10
7.	Air Terjun Goa Tunggal	1.428	-
8.	Desa Wisata Almour	30.783	7
9.	Desa Wisata Lombok Kulon	3.156	-
10.	Pemandian Tasnan Baru	15.665	-
11.	Pemandian Air Hangat Blawan	3.948	20
12.	Pemandian Kelapa Gading	13.727	-
13.	Pemandian Kharisma	-	-
14.	Bosamba Rafting	244	-
15.	River Tubing Tlogosari	346	-
16.	Museum Kereta Api	5.568	23
17.	Makam KI Ronggi	2.351	-
18.	Padepokan Seni Gema Buana	1.063	-
19.	Batik Sumbersari	3.358	-
20.	Sumber Salak	212	-
21.	SitusPekauman	712	3
22.	Taman Rengganis dan Situs Glingseran	10.676	3
23.	Batu Soson Solor	1.746	4
24.	Situs Banyu Putih	364	-
25.	Pendakian Gunung Raung	376	24
26.	Event di Kb, Bondowoso	22.979	954

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Desa Wisata Lombok Kulon memiliki potensi pariwisata dengan memiliki intensitas pengunjung yang tidak kalah dengan destinasi pariwisata lainnya dinaungi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Banyaknya jumlah pengunjung yang datang dipengaruhi oleh pengembangan yang dilakukan pengelola Desa Wisata Organik Lombok Kulon mulai dari melakukan promosi, pengembangan akomodasi, dan Sumber Daya Manusia seperti masyarakat sekitar yang mendukung adanya Desa Wisata Organik Lombok Kulon.

Desa Wisata Organik Lombok Kulon yang dikelola oleh masyarakat Desa Lombok Kulon dengan berlandaskan Undang-Undang Kepariwisataan pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak:

- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata;
- c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan

Pada Undang-Undang Kepariwisataan No 10 tahun 2009 pasal 19 ayat (1) pada butir b dan d disebutkan bahwa setiap masyarakat dapat membangun kepariwisataan dan ikut berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata ini hanya sebagai fasilitator seperti ikut mempromosikan dan membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sebagai pelaku atau operasional.

Desa wisata biasanya merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relative asli. Selain itu beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Selain keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga memiliki persyaratan untuk menunjang sebagai fasilitas yang akan

memudahkan pengunjung desa wisata dalam melakukan desa wisata. Menurut Nuryanti (1993) Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Khusus untuk akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa produk-produk wisata (*homestay*). Sebagaimana telah dinyatakan oleh Nuryanti tentang arti desa wisata, Desa Lombok Kulon yang telah direkomendasikan menjadi Desa Wisata Organik melakukan pengembangan potensi yang ada di desa wisata tersebut.

Sebagaimana pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso memiliki aset wisata organik dan memiliki potensi sebagai berikut.

1. Pertanian organik yang ada di Desa Lombok Kulon 100% Organik
2. Adanya kolam peternakan ikan Lele, Nila, Gurami dan Koi sebanyak 6 kolam;
3. Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Organik Lombok Kulon sangat besar karena melibatkan kurang lebih kelompok peternak ikan dan 5 kelompok pertanian;
4. Memiliki 6 kelompok kerja untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Desa Lombok Kulon;
5. Pemberdayaan masyarakat berbasis keaktifan anggota kelompok tani di Desa Lombok Kulon dimana setiap Kelompok Tani memiliki anggota yang cukup banyak sehingga aktivitas pertanian perikanan organik dapat dilakukan dengan cepat, aktif dan *massive*;
6. Eksistensi Kelompok - kelompok MINA USAHA pimpinan Bapak Baidhawi yang telah diakui eksistensinya hingga tingkat Internasional sebagai kelompok tani yang konsisten dalam hal pengembangan pertanian dan perikanan organik;

7. Kelompok MINA USAHA tersebut sering menerima kunjungan banyak tamu dari berbagai kalangan yang berasal dari daerah lain dan segenap Kementrian RI untuk studi banding, Kunjungan Kerja, serta *research*;
8. Masyarakat lokal Desa Wisata Organik Lombok Kulon langsung berinteraksi dengan wisatawan yang didampingi oleh pengelola Desa wisata sehingga terjadi *direct sharing* terkait ilmu, pengalaman dan aktivitas sehari – hari penduduk serta manfaat pertanian perikanan organik bagi masyarakat.
9. Masyarakat lokal Desa Wisata Organik Lombok Kulon diharapkan langsung merasakan manfaat dan dampak ekonomi yang positif terkait kunjungan wisatawan dengan cara wisatawan bisa langsung bertansaksi atau membayar kepada penduduk untuk produk atau hasil pertanian dan peternakan organik yang diminati tanpa ada perantara.

Banyaknya potensi yang dapat dikembangkan lebih optimal, maka seharusnya bisa didukung penuh oleh masyarakat sekitar dan pemerintah. Maka dari itu semua potensi yang dapat dikembangkan untuk perkembangan Desa Wisata Organik tersebut diatas harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah pemerintah Desa Lombok Kulon pemerintah Kabupaten Bondowoso. Peran pemerintah keduanya diharapkan menjadi pendukung perkembangan desa wisata.

Demi terwujudnya pembangunan yang maksimal. Beberapa aktor harus terlibat dalam pembangunan tersebut, aktor tersebut antara lain adalah pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat. Potensi wisata organik yang demikian menjanjikan tersebut, tentunya perlu didorong ke arah yang memiliki orientasi jangka panjang dan tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan obyek dan daya tarik wisata. Agar terwujudnya desa yang berdikari dalam ekonomi berdasarkan budaya lokal.

Berangkat dari latar belakang mengenai mengunggulkan potensi lokal berupa dibangunnya Desa Wisata Organik dan dari banyaknya potensi di desa yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang bagaimana Pengembangan Desa Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Selain meneliti tentang pengembangan desa dalam upaya mengoptimalkan potensi, peneliti juga akan meneliti tentang penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pengembangan desa di Desa Lombok Kulon.

1.2. Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dipahami apa sebenarnya masalah itu. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu perasaan keingintahuan, kegundahan dan kebingungan yang timbul akibat adanya ketidakjelasan atas suatu fenomena yang terjadi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah itu terjadi sekaligus menimbulkan keingintahuan peneliti terkait solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena.

Pengertian mengenai masalah di atas dan dipadukan dengan latar belakang yang dibangun peneliti untuk mengadakan penelitian ini menuntun peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?
2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian di atas. Peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut ini:

1. Mendeskripsikan mengenai pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui tentang penghambat dan pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Kata lainnya, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21). Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. bagi penulis

Sebagai wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan S1 diprogram studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

- b. bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dalam mengelolah potensi yang dimiliki dalam pengembangan desa wisata serta hambatan dan pendukung pengembangan Desa Wisata Organik dalam upaya mengoptimalkan potensi yang ada di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

c. bagi pembaca

Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi seluruh pembaca khususnya mereka yang berkepentingan dan membutuhkan dalam hal yang masih berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka memuat kajian teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti serta kerangka berpikir yang dibangun dari teori dan konsep dalam tinjauan pustaka. Menurut Wardiyanta (2006:90) tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai tinjauan pustaka tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya.

2.1. Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial

yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang terkait dalam pengembangan desa wisata organik dalam upaya mengoptimalkan potensi Desa Wisata Organik sebagai desa wisata yang ada di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang meliputi :

- a. Otonomi;
- b. *New Public Service*;
- c. Pemerintahan;
- d. Desa Wisata;
- e. Potensi;
- f. Pengembangan Potensi;
- g. Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- h. Pertanian Organik

2.2. Pengertian Otonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul. Otonomi individu menjadi modal dasar bagi terbentuknya otonomi pada level yang lebih tinggi. Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah memiliki keinginan untuk mengatur

rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antardaerah.

Daerah memiliki hak dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pembangunan didaerahnya dengan keunikannya masing-masing. Bagi daerah yang daya saingnya belum memadai untuk berkompetisi, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan dorongan dan support agar daerah tersebut mampu berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi hingga mampu bersaing pada tingkatan persyaratan minimum.

Desa juga memiliki otonomi tersendiri untuk mengelolah pemerintahannya, sebagaimana telah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.” (Widjaja, 2003:3)

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama

lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

2.3. New Public Service

Paradigma *New Public Service* dikenalkan oleh Janet V. Dornhardt dan Robert B. Dornhardt melalui buku mereka yang berjudul “*The New Public Service, Serving not Steering*” yang terbit pada tahun 2003. Buku yang diawali dengan kalimat “*Government shouldn’t be run like a business; it should be run like a democracy*”.

Pemerintahan (administrasi negara) tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis, menjalankan pemerintahan sama dengan menggerakkan tatanan demokrasi. Perdebatan tentang acuan nilai administrasi publik tentang apakah berorientasi pada nilai-nilai ekonomi (efisien dan efektivitas) ataukah nilai-nilai politik (keadilan, demokrasi, penghargaan HAM dan sebagainya) telah menjadi isu klasik dalam studi administrasi public. Denhart dan Denhart mencoba membagi paradigam administrasi negara atas tiga kelompok besar, yaitu paradigma *The Old Public Administration* (OPA), *The New Public Management* (NPM) dan *The New Public Service* (NPS).

Menurut Denhart dan Denhart paradigam lama seperti NPM bisa gagal dalam mengatasi masalah publik karena pandangan NPM organisasi pemerintahan diibaratkan sebagai sebuah kapal. Adapun menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah diatas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan lajunya kapal bukan mengayuh kapal tersebut. Urusan kayuh mengayuh diserahkan kepada organisasi diluar pemerintahan, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestikasi pemerintah. Tugas pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis. Denhart dan Denhart mengkritik paradigam NPM sebagai paradigam yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (*who owned the boat*). Seharusnya pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara karena merekalah pemilik “kapal” (organisasi pemerintah).

Menurut King dan Stives (dalam Keban. 2008:247) mendesak agar para administrator melibatkan warga masyarakat. Mereka harus bisa melihat masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan sehingga dapat membagi otoritas dan kepercayaan dengan keefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun kepercayaan dan bersifat responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi seperti NPM. Jika paradigam *Old Public Administration* yang menekankan nilai-nilai ekonomis-rasional yang memunculkan

paradigm tandingan *The New Public Administration*, maka *The New Public Service* karya Denhart dan Denhart ini memiliki tujuan sama yakni sebagai *counter paradigm* atau dapat dikatakan hendak mendekonstruksi prinsip-prinsip *New Public Management* khususnya prinsip yang dikemukakan Osborne dan Gaebler.

Konsep *The New Public Service* adalah konsep yang menekankan berbagai elemen (Toha, 2008:84). Ide dasar dari konsep ini dibangun dari beberapa teori, diantaranya:

- Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Perlunya melibatkan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
- Model komunitas dan masyarakat sipil. Akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
- Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus focus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

Dilihat dari teori yang mendasari munculnya *New Public Service* (NPS), bahwa NPS mencoba mengartikulasikan berbagai teori dalam menganalisis persoalan-persoalan public. Oleh karena itu dapat dilihat dari berbagai aspek menurut Denhart dan Denhart paradigma NPS memiliki beberapa karakteristik seperti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Karakteristik-karakteristik *New Public Service* (NPS)

Aspek	New Public Service (NPS)
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan public	Kepentingan public adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi public	<i>Citizen's</i> (warga negara)
Peran pemerintah	<i>Serving</i> (melayani)
Akuntabilitas	Multiaspek : akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standart professional
Struktur organisasi	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagai sevara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003:43)

a. Teori Demokrasi sebagai Dasar Teoritis

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Model *new public service*, pelayanan publik berlandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya galiter dan persamaan hak diantara warga negara, karena pada dasarnya rakyat (*demos*) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, berskonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak dalam statusnya alam kodrati, sampai kestatusnya sebagai warga negara, masyarakat itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkari dan/atau dilanggar oleh siapapun yang tengah berkuasa. Pada dasarnya *New Public Service* adalah konsep-konsep yang pada hakekatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Kepentingan Publik adalah hasil dialog berbagai nilai

Model NPS memiliki konsep kepentingan publik yang merumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara keseluruhan.

c. Warga Negara sebagai tanggungjawab dari birokrasi publik

NPS memandang publik sebagai “*citizen*” atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara dan sebagainya. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban politik menjadikan relasi negara dan publik tidak bersifat sukarela, karena itu abdi negara tidak hanya responsif terhadap *customer*, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara.

d. Peran pemerintah adalah melayani

Pemerintahan dalam konsep NPS merupakan *shared leadership* dimana kendali kepemimpinan tidak terpusat ditangan atasan akan tetapi melibatkan banyak orang, banyak kelompok. Kedudukan pimpinan atau pejabat pemerintah sebagai pelayan publik atau abdi masyarakat. Pemerintah juga harus cermat dalam mengolaborasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Akuntabilitas yang multi aspek

Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standart profesioanal, dan kepentingan warga negara. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnis sendiri dimana

konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggung sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat.

f. Struktus organisasi

Fokus implementasi dalam konsep NPS pada keterlibatan warga negara dan pembangunan komunitas. Organisasi menjadi ruang publik dimana manusia (*citizen* dan administrator) dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik.

g. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator

Asumsi model NPS terhadap motivasi pegawai dan administrator adalah untuk melayani masyarakat sepenuhnya dan bukan berdasarkan atas imbalan yang akan didapatkan. Pegawai dan administrator memandang masyarakat adalah warga negara yang harus dipertanggungjawabkan kebutukannya, bukan karena status sosialnya akan tetapi karena setiap warga negara harus memiliki hak yang sama sehingga mendapatkan mutu pelayanan yang sama juga dari birokrasi.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip NPS, Denhart dan Denhart yang memiliki diferensiasi dengan prinsip-prinsip OPA dan NPM. Prinsip-prinsip konsep NPS sebagai berikut:

- a. Melayani masyarakat sebagai warga negara bukan sebagai pelanggan, seperti melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah negara bukan pelanggan.
- b. Memenuhi kepentingan publik yang seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggungjawabnya kepada pihak lainnya dalam memenuhi kepentingan publik.

- c. Mengutamakan warga negara di atas kewirausahaan. Kewirausahaan itu penting namun warga negara berada di atas segala-galanya.
- d. Berpikir strategis dan bertindak demokratis. Pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.
- e. Menyadari kompleksitas akuntabilitas. Pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan tekstur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat.
- f. Melayani bukan mengarahkan. Fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.
- g. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.

2.4. Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Di dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah disamping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin (2009:19)

dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa” menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah pemerintah kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan.

Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang desa tersebut.

Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 kewenangan desa terdiri dari:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.5. Desa Wisata

Program desa wisata yang dibentuk pemerintah secara langsung telah mampu melibatkan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengelola kampung halamannya sesuai dengan keotentikan desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 4 bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan. Adanya kepedulian bersama antara pemerintah serta pihak yang terkait dalam mengembangkan desa wisata dirasa akan mampu merangsang perekonomian masyarakat. Kepedulian pemerintah dengan kebijakan yang proaktif terhadap desa wisata diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Desa wisata biasanya merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Selain keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga memiliki persyaratan untuk menunjang sebagai fasilitas yang akan memudahkan pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada disuatu kawasan desa wisata seperti sarana transportasi,

telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa produk-produk wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli. Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut.

1. Akseibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata;
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya;
4. Keamanan di desa tersebut terjamin;
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai;
6. Beriklim sejuk atau dingin; dan
7. Berhubungan dengan obyek wisata yang lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Nuryanti (1993) Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata :

- a. Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Desa wisata memiliki macam-macam komponen desa wisata. Namun beberapa komponen desa wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar desa wisata. komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berpengaruh.

Para pakar pariwisata mempunyai pandangan yang berbeda mengenai komponen dasar desa wisata, namun ada beberapa bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya persamaan komponen dasar dalam pariwisata menurut para ahli sebagai berikut.

- a. Menurut Gumelar (2010) desa wisata dilihat dari komponennya sebagai berikut:
 - keunikan, keaslian, sifat khas;
 - letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa;
 - berkaitan dengan berkelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung; dan
 - memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.
- b. Menurut Putra (2006) desa wisata dilihat dari komponennya sebagai berikut:
 - memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat;
 - lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual;
 - diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya,
 - aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata; dan
 - terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebersihan.
- c. Menurut Prasiasa (2012) desa wisata dilihat dari komponennya sebagai berikut:
 - partisipasi masyarakat;
 - sistem norma setempat;
 - sistem adat setempat; dan
 - budaya setempat.

Desa wisata memiliki 3 karakteristik utama dari objek wisata yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan suatu objek wisata agar menarik dan dikunjungi banyak wisatawan. Seperti yang diungkapkan Drs. Oka A. Yoeti, 1985, karakteristik tersebut antara lain:

- a. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”. Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah itu harus mempunyai daya tarik yang khusus dan unik.
- b. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to do*”. Artinya di tempat tersebut selain banyak yang dapat disaksikan, harus disediakan pula fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- c. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*”. Artinya di tempat tersebut harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh dibawa pulang.

Daya tarik wisata menjadi komponen utama dan sangat penting dalam pariwisata karena merupakan segala sesuatu yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Macam-macam daya tarik wisata yang dibedakan menjadi tiga obyek daya tarik wisata Menurut Suryadana dan Octavia (2015:520), daya tarik wisata dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alam maupun setelah ada usaha budidaya. Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu:

- a. flora dan fauna;
- b. keunikan dan kekhazanahan ekosistem, misalnya pantai dan hutan bakau;

- c. gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun, dan danau; dan
 - d. budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan.
2. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Daya tarik wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, serta pertunjukan dan kerajinan.

3. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Daya tarik wisata minat khusus merupakan jenis wisata baru yang dikembangkan di Indonesia, wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Dengan demikian, biasanya pariwisataawan harus memiliki keahlian. Contohnya berburu, mendaki gunung, arum jeram, tujuan pengobatan, agrowisata, dan lain lain.

Selanjutnya menurut Inskeep (1991) (dalam Zakaria dan Suprihardjo (2014), desa wisata adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional. Biasanya didesa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Maksud dari pengertian tersebut adalah desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak ditemukan diperkotaan.

Berdasarkan perkembangannya desa wisata dibagi menjadi tiga kategori. Dalam buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau, kategori tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Desa Wisata Embrio

Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata.

b. Desa Wisata Berkembang

Desa wisata berkembang yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.

c. Desa Wisata Maju

Desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuk forum pengelolah serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik..

2.5.1. Pengembangan Desa Wisata

Strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal mengacu pada potensi fisik dan non fisik yang terdapat pada masing-masing desa yang akan dikembangkan, hal ini berkaitan dengan kekhasan masing-masing desa dalam menjual potensinya untuk dijadikan modal dasar sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan apabila tidak didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di dalam desa tersebut.

Potensi desa terdiri dari potensi fisik dan potensi nonfisik yang diharapkan manfaatnya bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa yang meliputi potensi fisik sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah yang subur merupakan potensi utama desa. Tanah dapat berupa sawah, tegal, atau pekarangan. Penduduk desa mengelola dan memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

b. Air

Melimpahruahnya sumber air, selain dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari juga dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan industri air minum.

c. Iklim

Iklim sangat memengaruhi aktivitas penduduk desa yang pada umumnya bermata pencaharian petani. Kegiatan petani untuk menentukan jenis tanaman sangat bergantung pada iklim. Iklim sejuk, dingin, dan curah hujan cukup sangat mendukung kehidupan penduduk desa dalam meningkatkan hasil pertanian.

d. Flora dan fauna

Potensi flora di desa adalah masih banyak tersedianya tanaman bahan makanan pokok, seperti padi, jagung, dan ketela pohon. Adapun potensi fauna berupa hewan ternak, antara lain ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Kegiatan peternakan menghasilkan daging, telur, dan susu. Hasil pertanian dan peternakan dapat menarik penduduk lain untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan membeli barang hasil pertanian dan peternakan.

Selain potensi fisik, terdapat juga potensi non fisik yang dimiliki desa antara lain sebagai berikut.

a. Masyarakat Desa

Penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Penduduk desa akan mengolah potensi sumber daya yang dimiliki desanya. Suatu wilayah desa yang mempunyai jumlah penduduk banyak dengan berbagai keterampilan akan memberikan sumbangan bagi pendapatan desa tersebut.

b. Lembaga Sosial Desa

Lembaga sosial desa, seperti pendidikan, adat, koperasi, dan lembaga lainnya dapat memberikan bantuan dan mendukung kegiatan penduduk desa.

c. Aparatur Desa

Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa untuk mengantarkan terwujudnya penyelenggaraan

pemerintah desa yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna dalam mengelola pembangunan.

Peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya alam yang ada di desa wisata tersebut. Dengan membuka diri terhadap dunia luar maka konsekuensi yang harus diterima selain peningkatan kesejahteraan juga pengaruh yang dibawa oleh para tamu /wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu strategi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya alam sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kualitas lingkungan. Apabila kualitas lingkungan meningkat setelah dijadikan desa wisata maka pengembangan desa wisata tersebut termasuk berhasil dalam pengelolaannya, dan sebaliknya apabila kualitas lingkungan menurun setelah dijadikan desa wisata maka pengembangan desa wisata tersebut termasuk gagal dalam pengelolaannya.

Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Dalam menjalankan desa wisata diperlukan beberapa kriteria. Menurut Nuryanti (1993) beberapa kriteria desa wisata sebagai berikut :

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencangkup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tepat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa.

Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasayrakan yang ada.

5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap.

Menurut Nuryanti (1993) prinsip dasar dari pengembangan desa wisata:

1. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.
2. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.
3. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau “sifat” atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Ada beberapa faktor-faktor dalam pengembangan desa wisata. Faktor-faktor pengembangan desa wisata sebagai berikut.

1. Menurut Gumelar (2010) faktor pengembangan desa wisata.
 - Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
 - Menguntungkan masyarakat setempat;
 - Berskala kecil;
 - Melibatkan masyarakat setempat; dan
 - Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.
2. Menurut Putra (2006) faktor pengembangan desa wisata.
 - Pariwisata terintegrasi dengan masyarakat;
 - Menawarkan berbagai atraksi khas; dan
 - Akomodasi berciri khas desa setempat.

Menurut Soemarno (2010:3-4) untuk mensukseskan pengembangan desa wisata, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta dibidang-bidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan.

2. Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

3. Kegiatan Pemerintahan di Desa

Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

4. Promosi

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.

5. Festival/Pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan

lain sebagainya.

6. Membina Organisasi Warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka.

7. Kerjasama dengan Universitas.

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

Sedangkan untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di suatu desa wisata, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut.

1. *Eco-lodge*

Renovasi *homestay* agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan, atau membangun *guest house* berupa, *bamboo house*, *traditional house*, *log house*, dan lain sebagainya.

2. *Eco-recreation*

Kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa (*hiking*), *biking* di desa dan lain sebagainya.

3. *Eco-education*

Mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkungan dan mengenalkan flora dan fauna yang ada di desa yang bersangkutan.

4. *Eco-research*

Meneliti flora dan fauna yang ada di desa, dan mengembangkan produk yang dihasilkan di desa, serta meneliti keadaan sosial ekonomi dan budaya

masyarakat di desa tersebut, dan sebagainya.

5. *Eco-energy*

Membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air untuk *Eco-lodge*.

6. *Eco-development*

Menanam jenis-jenis pohon yang buahnya untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain agar bertambah populasinya.

7. *Eco-promotion*

Promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan mengundang wartawan untuk meliput mempromosikan kegiatan desa wisata.

Prasiasa (2011:101-104) menyatakan bahwa, pengembangan desa wisata menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahapannya. Tujuannya adalah agar pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat tersebut berwujud pada partisipasi yang dapat dilihat dalam lima tahap, antara lain sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong pengembangan desa wisata.

2. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang diberi kepercayaan dalam pengembangan desa wisata.

3. Tahap Operasional

Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan non fisik. Partisipasi fisik dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya. Kedua, masyarakat menyediakan sumber-sumber

penunjang seperti bangunan. Sedangkan partisipasi non fisik juga dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat dengan penuh kesadaran mempelajari bahasa asing. Kedua, masyarakat mempelajari pariwisata pada lembaga pendidikan formal.

4. Tahap Pengembangan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan, antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pengelolaan usaha penginapan, usaha kerajinan, usaha warung makanan dan minuman, dll.

5. Tahap Pengawasan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif untuk mencegah agar ddesanya tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif.

2.6. Potensi

Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai lahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita (Kartasapoetra, 1987). Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Pengertian potensi menurut para ahli lainnya mengemukakan bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatnya diperlukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan khusus.

Gambar 2.1 Peta Potensi Daerah (Sumber: Mahmudi, 2010:4)

POTENSI

Tinggi	KUADRAN II Potensi tinggi, kemampuan mengelola rendah (Intensifikasi)	KUADRAN I Potensi tinggi, kemampuan mengelola tinggi (Promisi dan ekspansi)
	KUADRAN IV Potensi rendah, kemampuan mengelola rendah (Edukasi dan Pengembangan)	KUADRAN III Potensi rendah, kemampuan mengelola tinggi (Ekstensifikasi/Ekspansi)
Rendah	Rendah	Tinggi

KEMAMPUAN MENGELOLA

Mahmudi menjelaskan bahwa Kuadran I adalah kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini hingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut. Hal ini khususnya terkait dengan potensi ekonomi dari sumber daya alam yang tidak diperbarui, seperti tambang.

Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi ini pada umumnya dialami oleh pemerintahan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi pada kuadran II ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk

pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karenanya pada kondisi kuadran II ini diperlukan semangat nasionalisme ekonomi, yakni semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Kuadran III adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini strategis yang dapat dilakukan tidak memiliki potensi hutan, tetapi dengan adanya daya dukung sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki mampu mengolah hasil hutan menjadi produk yang berkualitas tinggi, misalnya *furniture* kualitas ekspor. Meskipun pemerintah setempat tidak memiliki hutan, pemerintah tersebut dapat melakukan ekspansi dengan memanfaatkan potensi hasil hutan dari daerah lain untuk menjadi produk yang memiliki ekonomi tinggi.

Kuadran IV adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengolah pendapatan juga rendah. Pada kondisi kuadran IV ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan (edukasi) sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Menurut peta potensi daerah yang disampaikan mahmudi, sektor pariwisata yang berada di Kabupaten Bondowoso termasuk dalam kuadran ke II karena Bondowoso memiliki banyak tempat wisata yang alami ataupun buatan. Oleh karena itu jika tidak dikelola dengan benar dan dengan lembaga pengelola yang benar pula, maka akan rawan dieksploitasi secara berlebihan dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kemampuan yang ada pada desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh

suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan organisasi sosial, serta apparatus dan pamong desa.

Bintarto membedakan potensi desa menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik:

1) Potensi fisik meliputi :

- tanah sebagai sumber tambang dan mineral, sumber tanaman, bahan makanan dan tempat tinggal;
- air, kondisi air untuk irigasi dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- iklim yang penting untuk kegiatan agraris;
- ternak sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan sumber pendapatan; dan
- manusia, baik sebagai sumber tenaga kerja potensial, sebagai pengolah lahan dan juga produsen bidang pertanian, juga sebagai tenaga kerja di bidang non pertanian.

2) Potensi non fisik meliputi:

- masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong;
- lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial yang dapat membimbing memajukan masyarakat; dan
- aparatur atau pamong desa, untuk menaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran pemerintah desa.

Menurut Sutanto (2001) mendefinisikan pertanian organik sebagai suatu sistem produksi pertanian yang berdasarkan daur ulang hayati. Daur ulang hayati dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu

memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Pertanian organik dinilai sebagai sistem pertanian yang mampu menyediakan ketersediaan pangan secara berkelanjutan karena ramah lingkungan. Pertanian organik tidak identik dengan pertanian tradisional. Pertanian organik dinilai sebagai strategi pertanian yang mampu menjawab tantangan bahwa pertanian organik mampu menyediakan ketersediaan pangan secara berkelanjutan karena ramah lingkungan. Untuk itu kesadaran masyarakat secara umum akan pentingnya mengkonsumsi produk-produk organik perlu ditingkatkan melalui berbagai cara. Demikian pula halnya dengan para pelaku dunia usaha pertanian untuk dapat melakukan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya produk pertanian organik pantas dihargai lebih tinggi bukan karena para petani sudah menghasilkan bahan pangan melainkan lebih sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para petani yang telah menjaga kelestarian lingkungan.

2.7. Pengembangan Potensi

Pengembangan potensi desa yang dikembangkan adalah yang positif, sedangkan yang negatif harus dicegah dan dihambat agar tidak berkembang. Potensi-potensi tersebut merupakan salah satu pembeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan Potensi unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Perdayakan Masyarakat.

Menurut Maksudin (2001) secara khusus tujuan pengembangan potensi desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab;
- b. mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin;

- c. memberntuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha;
- e. mengembangkan potesi ekonomi unggulan Desa /Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan; dan
- f. mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun *stakeholders* lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu secara efektif sesuai tujuan dalam arti hasilnya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan;
2. diinfentarisir pemasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa; dan
3. menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan/kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini.

2.8 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Tidak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata diakui oleh para praktisi dengan tujuan dan prespektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai, antara lain.

“pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dalam sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan sepenuhnya untuk bekerja atau mencari

keuntungan di tempat yang dikunjungi, melainkan untuk menikmati perjalanan tersebut guna berlibur atau berekreasi untuk menyegarkan pikiran.” Yoeti, (1996:109)

“pariwisata adalah suatu industry baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standard hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industry-industri klasik seperti industry kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.” Salah Wahab, (1982:20)

Menurut Wahab (1996:6) menyebutkan bahwa seseorang melakukan perjalanan pariwisata guna memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginannya. Oleh karena itu, pariwisata sebagai suatu gejala terwujud dalam beberapa bentuk sebagai berikut.

1. Menurut jumlah orang yang berpergian

- Pariwisata Individu
- Pariwisata Rombongan

2. Menurut maksud berpergian

- Pariwisata Rekreasi atau Pariwisata Santai
- Pariwisata Budaya
- Pariwisata Pulih Sehat
- Pariwisata Sport
- Pariwisata Temu Wicara (Konvensi)

3. Menurut alat transportasi

- Pariwisata Darat
- Pariwisata Tirta (Air)
- Pariwisata Dirgantara (Udara)

4. Menurut letak geografis

- Pariwisata Domestik Nasional
- Pariwisata Regional

- Pariwisata Internasional

5. Menurut umur

- Pariwisata Remaja
- Pariwisata Dewasa

6. Menurut jenis kelamin

- Pariwisata Pria
- Pariwisata Wanita

7. Menurut tingkat harga dan tingkat sosial

- Pariwisata Taraf Lux
- Pariwisata Taraf Menengah
- Pariwisata Taraf Menengah-Kebawah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Menurut Kusudianto (dalam Pintana dan Diarta, 2009:126) destinasi wisata dapat digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, sebagai berikut.

1. Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai, hutan;
2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater dan masyarakat lokasi;
3. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan;
4. Event seperti pesta kesenian Bali, pesta Danau Toba, pasar malam; dan
5. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia, wisata belanja di Hongkong

6. Daya tarik psikologis, seperti pertualangan, perjalanan romantic, keterpencilan.

Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik, lebih luas atau meningkat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002) terdapat pengertian pengembangan, yaitu: 1) hal. Cara atau hasil mengembangkan; dan 2) proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki. Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan budaya (Yoeti, 2008:273)

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sebagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Pengembangan Pariwisata menurut Pearce (1981:12) dapat diastikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan menurut Marpaung (2000:39) pembangunan dan pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi pemerintah, pengelola serta masyarakat sekitar objek pariwisata. Namun tidak dipungkiri, pembangunan dan pengembangan pariwisata juga membawa dampak negative bagi lingkungan.

Carter dan Fabricius (dalam Sunaryo, 2013:172) berpendapat bahwa berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan sebuah destinasi pariwisata, paling tidak akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Pengembangan atraksi dan daya tarik wisata

Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi. Berbagai wujud dari atraksi wisata ini dapat berupa: arsitektur bangunan, karya seni budaya, dan pengalaman tertentu ataupun berbagai bentuk even pertunjukan.

b. Pengembangan amenities dan akomodasi wisata

Pada hakekatnya Amenitas adalah merupakan fasilitas dasar: utilitas, jalan raya, transportasi, akomodasi, pusat informasi pariwisata dan pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan yang berkunjung ke destinasi merasa nyaman dan senang. Berbagai fasilitas wisata yang perlu dikembangkan dalam pusat informasi wisata, pusat atau *took* cinderamata, pusat kesehatan, pusat pelayanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, biro perjalanan wisata, ketersediaan air bersih, listrik dan sebagainya.

c. Pengembangan aksesibilitas

Aksesibilitas wisata dalam hal ini adalah: segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Menurut French (dalam Sunaryo, 2013:173) aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata atau destinasi tertentu, akan tetap juga waktu yang dibutuhkan, tanda petunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat terkait lainnya.

d. Pengembangan image (citra wisata)

Pencitraan (*image building*) sebuah destinasi merupakan bagian dari *positioning*, yaitu kegiatan untuk membangun citra atau *image* di benak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antar aspek : kualitas, produk, komunikasi pemasara, kebijakan harga dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau *image* yang ingin dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk. Pada dasarnya *positioning* bertujuan

untuk membangun wisatawan dalam rangka mengetahui perbedaan yang sebenarnya antara suatu destinasi dengan destinasi pesaingnya.

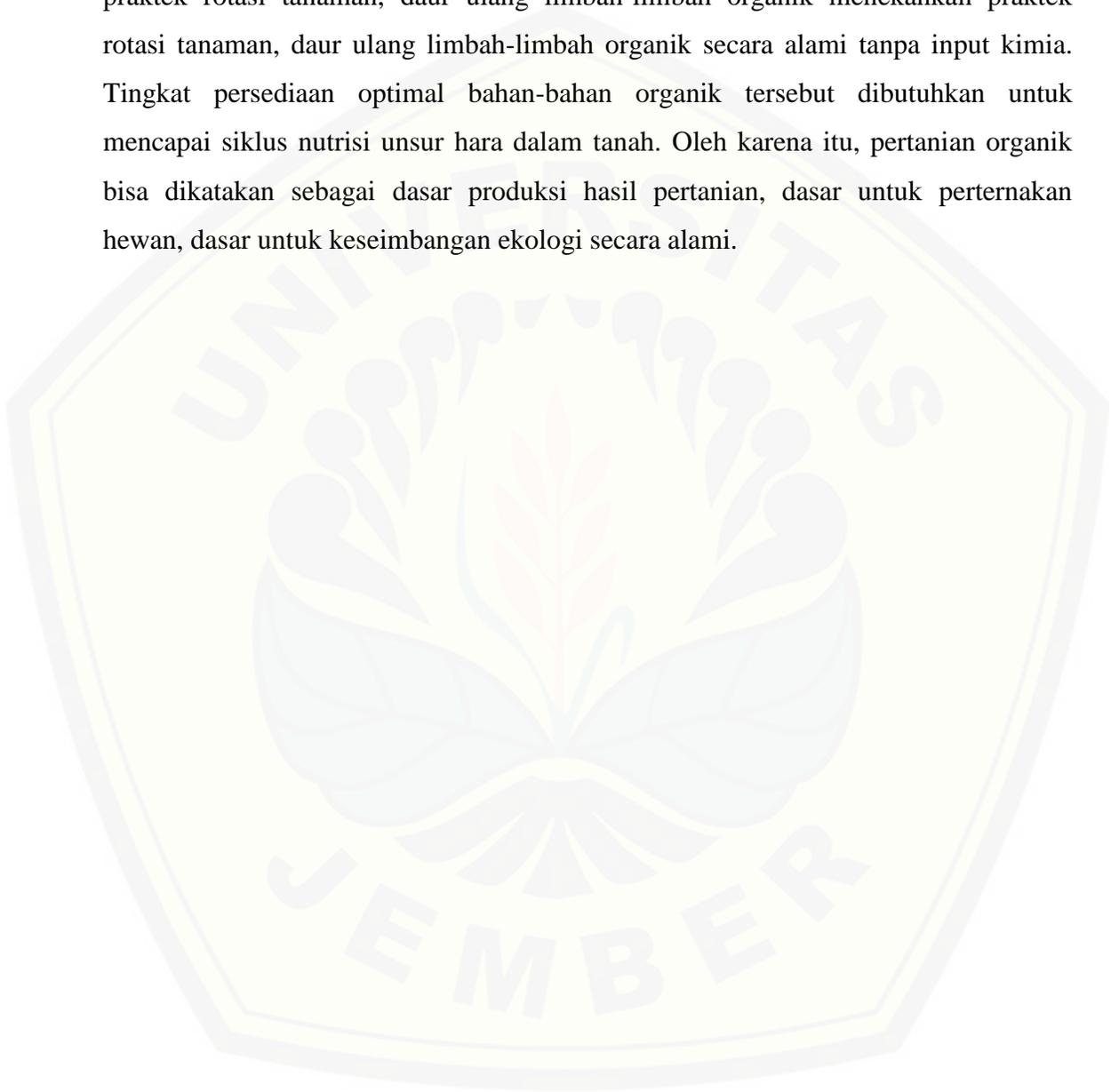
2.9 Pertanian Organik

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bertujuan untuk tetap menjaga keselarasan (harmoni) dengan sistem alami, dengan memanfaatkan dan mengembangkan semaksimal mungkin proses-proses alami dalam pengelolaan usaha tani (Kasumbogo Untung, 1997). Pertanian organik menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetik, ZPT dan perangsang lainnya yang mengandung bahan-bahan kimia buatan (Saragih, 2008). Dengan kata lain pertanian organik suatu sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia buatan, mewujudkan sikap dan perilaku hidup yang menghargai alam, dan berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan (Joko Prayogo dkk, 1999).

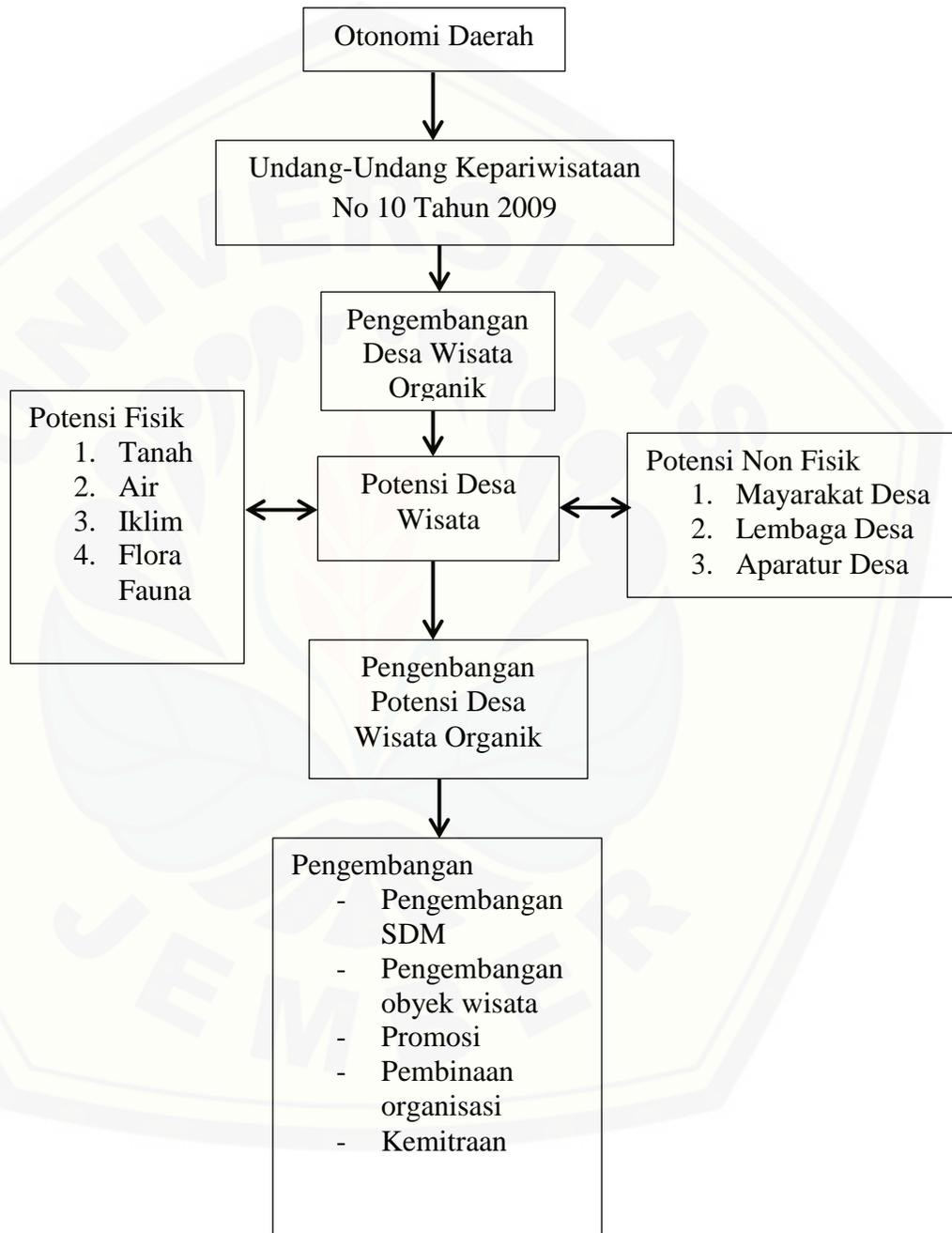
Kegunaan budidaya organik pada dasarnya adalah untuk membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi atau yang seringkali disebut sebagai pertanian konvensional. Meskipun sistem pertanian organik dengan segala aspeknya jelas memberikan keuntungan banyak kepada pembangunan pertanian rakyat dan penjagaan lingkungan hidup, termasuk konservasi sumber daya lahan, namun penerapannya tidak mudah dan akan menghadapi banyak kendala. Sistem pertanian organik mengajak manusia kembali ke alam, sambil tetap meningkatkan produktivitas hasil tani melalui perbaikan kualitas tanah dengan tidak memakai atau mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Pertanian organik menghargai kedaulatan dan otonomi pertanian berdasarkan nilai-nilai lokal.

Rosenow, et al (1996) menyatakan pertanian organik dalam versi lain, yaitu merupakan sistem pertanian yang mempromosikan 8 aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memproduksi pangan dan serat. Sistem ini memperhatikan kesuburan tanah sebagai dasar kapasitas produksi dan sifat alami tanaman, hewan,

biofisik, lanscap, sehingga mampu mengoptimalkan kualitas semua faktor-faktor yang saling terintegrasi atau tergantung tersebut. pertanian organik menekankan praktek rotasi tanaman, daur ulang limbah-limbah organik menekankan praktek rotasi tanaman, daur ulang limbah-limbah organik secara alami tanpa input kimia. Tingkat persediaan optimal bahan-bahan organik tersebut dibutuhkan untuk mencapai siklus nutrisi unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, pertanian organik bisa dikatakan sebagai dasar produksi hasil pertanian, dasar untuk perternakan hewan, dasar untuk keseimbangan ekologi secara alami.



2.10 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) metode penelitian merupakan penggunaan aspek epistemologis yang diterangkan dalam bab tersendiri secara terperinci dan jelas. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah sistematis.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jika diibaratkan masalah penelitian adalah daging yang akan dipotong maka kita memerlukan alat untuk memotong daging tersebut, maka dari berbagai jenis alat yang dapat digunakan untuk memotong seperti silet, pisau gergaji maka alat yang paling tepat adalah pisau yang tajam. Begitu pula dengan penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukannya. Bab metode penelitian ini menguraikan beberapa sub-sub bab yang meliputi:

- a. Jenis penelitian;
- b. Tempat penelitian;
- c. Data dan sumber data;
- d. Penentuan informan penelitian;

- e. Teknik dan alat pengumpulan data;
- f. Teknik menguji keabsahan data;
- g. Teknik penyajian dan analisis data; dan
- h. Prosedur penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mengemukakan jenis penelitian sebagai penegasan kategori penelitian yang akan dilakukan. Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Arikunto dalam Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil pelaksanaan kolaborasi pengembangan destinasi pariwisata Pulomerah.

Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:8) diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu, penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan dengan teori yang bersifat umum melainkan berawal dari proses pengamatan. mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004: 6).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan potensi desa wisata organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

3.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena penelitian yang dilakukan bermula dari adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORAHUB) yang berlokasi di Jalan A. Yani No.33, Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
2. Desa Wisata Organik yang berlokasi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
3. Kantor Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso
4. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

3.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

Universitas Jember (2012:23) data adalah himpunan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan, “Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat”.

Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di Lapangan. Dalam penelitian ini berkenaan dengan data hasil observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada Desa Wisata Organik Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata organik .

B. Data Sekunder

Selain data sprimer diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Peneliti memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip dokumen ataupun berupa foto yang mendukung dalam penelitian.

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data

Data	Sumber Data
Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso	Data Sekunder (Website Bondowoso dalam Angka)
Daftar Pengunjung Wisatawan Bondowoso	Data Sekunder (Data Pengunjung Wisatawan Kabupaten Bondowoso)
Peta Pariwisata Kabupaten Bondowoso	Data Sekunder (Data Peta Pariwisata Bondowoso)
Profil Pengurus Desa Wisata Organik	Data Sekunder (Akta Notaris POKDARWIS Desa Wisata Organik Lombok Kulon)
Peraturan tentang pengelolaan pariwisata	Data Sekunder (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan)
Gambaran Jalan menuju Desa Wisata Organik	Data Primer <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan staff Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Wawancara dengan pengelola Desa Wisata Organik
Sejarah Desa Wisata Organik	Data Primer <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan pengelola Desa Wisata Organik - Wawancara dengan sekretaris Desa Lombok Kulon - Wawancara dengan staff Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso
Pengembangan Desa Wisata Organik	Data Primer <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan pengelola Desa Wisata Organik - Wawancara dengan sekretaris Desa Lombok Kulon - Wawancara dengan staff Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso

Sumber: Penelitian Pada Pengembangan Desa Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel 3.1 di atas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Data Sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang terdapat pada Akta Notaris pendirian POKDARWIS Desa Wisata Organik Lombok Kulon, Bondowoso dalam Angka, data pengunjung dan peta pariwisata Kabupaten Bondowoso yang terdapat di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk meberikan informasi yang dibutuhkan

terkait masalah penelitian. Sedangkan *snowball sampling* menurut Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. Kedua teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait potensi desa wisata organik dalam pembangunan kawasan desa di desa Lombok Kulon yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Lombok Kulon
- b. Pengelolah Desa Wisata Organik
- c. Masyarakat Desa Lombok Kulon
- d. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- e. Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

Tabel 3.2 Daftar Nama Informan

Nama	Jabatan	Data/Informasi yang ingin diperoleh
Junaedi	Staff Obyek Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Pariwisata Bondowoso - Data Pengunjung Pariwisata Bondowoso - Profil tentang Desa Wisata Organik - Sejarah Desa Wisata Organik - Perkembangan Desa Wisata Organik
Zainul	Sekretaris Desa Lombok Kulon	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Desa Wisata Organik - Perkembangan Desa Wisata Organik
Baidhawi	Pengelola Desa Wisata Organik	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Desa Wisata Organik - Struktur Pengurus Desa Wisata Organik - Sejarah Desa Wisata Organik - Perkembangan Desa Wisata Organik - Kegiatan di Desa Wisata Organik - Faktor penghambat dan pendukung dalam perkembangan Desa Wisata Organik
Wahyu A.P	Kepala Bidang Perundang-undangan Kabupaten Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK Bupati Desa Wisata Organik

Sumber: Penelitian pada Perkembangan Desa Wisata Organik di Desa Lomnok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

3.5 Teknik dan alat Pengumpulan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. observasi;
2. dokumentasi; dan
3. wawancara.

3.5.1 Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. jenis-jenis teknik observasi sendiri menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. eksperimental atau lawannya noneksperimental.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi sistematis. Pengertian teknik observasi non-partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka

yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Bondowoso.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
- c. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Sedangkan untuk alat pengumpulan data peneliti menggunakan *handphone* jenis *smartphone* yang memiliki fitur perekam suara dan pengambil gambar/foto, alat tulis dan buku catatan.

Tabel 3.3 Daftar Informasi yang dibutuhkan dan Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperlukan	Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Hasil
Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso	Teknik Dokumentasi	Deskripsi gambaran umum dari Kabupaten Bondowoso
Peta Pariwisata Kabupaten Bondowoso	Teknik Dokumentasi	Peta Wisata Kabupaten Bondowoso
Gambaran Desa Wisata Organik Lombok Kulon	Teknik Dokumentasi	Deskripsi gambaran umum Desa Wisata Organik Lombok Kulon
Daftar Pengunjung Wisatawan Kabupaten Bondowoso	Teknik Dokumentasi	Deskripsi daftar kunjungan Wisatawan Kabupaten Bondowoso tahun 2015-2017
Peta Menuju Lokasi Desa Wisata Organik Lombok Kulon	Teknik Dokumentasi	Peta Lokasi Desa Wisata Organik Lombok Kulon
Gambaran Struktur Pengurus POKDARWIS Desa Wisata Organik Lombok Kulon	Teknik Dokumentasi	Gambar Struktur Kepengurusan POKDARWIS Desa Wisata Organik Lombok Kulon
Pengembangan Desa Wisata Organik Lombok Kulon	Teknik Wawancara	Deskripsi pengembangan Desa Wisata Organik Lombok Kulon
Gambaran Umum Desa Wisata Organik Lombok Kulon	Teknik Observasi Teknik Wawancara	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Penelitian pada Pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

3.5.3 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti.

Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini:

Gambar 3.4 Tabel Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

3.6.1 Perpanjangan keikut-sertaan

Peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif dituntut untuk ikut serta tinggal dilapangan penelitian untuk mendapatkan data hingga tingkat jenuh. Oleh karena itu peneliti tidak hanya sekali atau dua kali saja terjun ke lapangan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong (2014:327-329) perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data, memastikan pemahaman konteks, dan membangun kepercayaan subjek.

3.6.2 Ketekunan pengamatan

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Oleh karena itu seorang peneliti menurut Moleong (2014:330)

seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

3.6.3 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini:

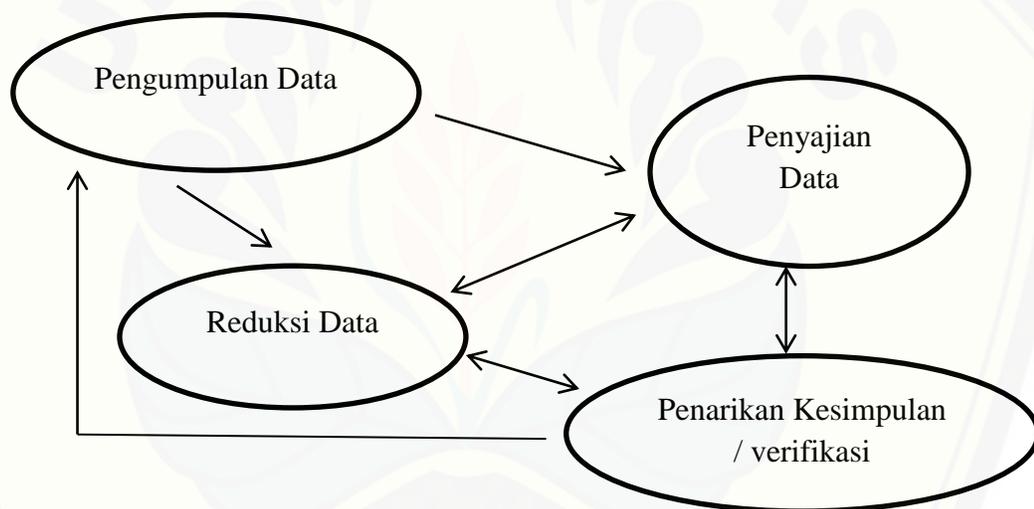
1. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
2. mengecek dengan berbagai sumber data; dan
3. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian.

Memperhatikan definisi mengenai teknis analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti.

Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga penili dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya.

Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut.

3.8 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dirancang dalam pelaksanaan penelitian. Usman dan Akbar (2009:80) menyebutkan bahwa prosedur

atau langkah penelitian kualitatif tidak linier melainkan sirkuler yang artinya dapat dimulai dari mana pun dan tidak memiliki batas-batas yang tegas sehingga fokus penelitian kualitatif bersifat dapat berubah-ubah (*emergent*). Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pra-lapangan

Tahap ini meliputi kegiatan studi pendahuluan, pengkajian masalah, penemuan judul, kajian pustaka, penyusunan metode penelitian dan pembuatan instrumen perolehan data dan draf wawancara.

2. Tahap terjun ke lapangan

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan pengumpulan data, analisis data, reduksi data,

3. Tahap Pasca-lapangan

Tahap ini mencakup kegiatan pengambilan keputusan, melakukan verifikasi dan penyusunan laporan penelitian.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan Desa Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Wisata Organik tiap tahunnya mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya.
2. Pengembangan Desa Wisata Organik selama 3 tahun terakhir (2015-2017) mengalami pengembangan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung untuk menikmati Desa Wisata Organik mulai dari kalangan muda sampai kalangan tua. Semakin banyaknya pengunjung yang datang mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh Desa Wisata Organik dan masyarakat sekitar.
3. Masyarakat yang mulai mengerti dengan dampak positif adanya Desa Wisata Organik untuk perekonomian mereka. Masyarakat juga dapat meningkatkan perekonomiannya dengan menjual hasil pertanian organik buatannya sendiri, dan juga masyarakat juga menjadi narasumber untuk wisatawan yang ingin mengetahui informasi tentang Desa Wisata Organik.
4. Peran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang semakin lama kurang maksimal karena menganggap Desa Wisata Organik sudah mampu mengembangkan Desa Wisatanya dengan mandiri.
5. Desa Wisata Organik dalam melegalitaskan POKDARWIS dilakukan sendiri dengan dibantu oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk dibuatkan legalitas berupa Akta Notaris. Bisa dilihat bahwa Desa Wisata Organik membangun dan mengembangkan desa wisata sendiri dengan mandiri tanpa bantuan Pemerintah Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebaiknya dapat membina POKDARWIS secara maksimal dari tahun ke tahun.
2. Pengelola seharusnya lebih aktif dalam mempromosikan desa wisatanya dimedia sosial. Karena web Desa Wisata Organik tersebut masih kurang aktif dalam mempromosikan desa wisatanya.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bintarto, R, 1983. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Denhardt, Janer V, and Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving Not Serving*. Armonk, N, Y: M. E Sharpe.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartasapoetra. 1987. *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maksudin. 2001. *Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197-211
- Marpaung, Happy dan Bahar. 2000. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiastuti, Rohman, dan Suji. 2014. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance*. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja
- Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Prasiasa, Dewa P. 2011. *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Salemba Humanika
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Saragih, S. A. 2008. *Pembuatan dan Karakteristik Karbon Aktif dari Batubara Riau sebagai Adsorben*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumber Saporin, 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soemarno, 2011. *Desa Wisata*. Malang: PP SUB.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutanto, Rachman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik, Pemasarakatan & Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutoro, Khasanah, Widuri, Handayani, Ninik, Qomariah, Aksa, Hastowiyono, Suharyanto dan Kurniawan. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suryadana, Liga dan Vanny Octavisa. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutanto, R., 2002. *Penerapan Pertanian Organik. Permasarakatan dan Pengembangannya*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Alfabeta.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Untung, Kasumbogo. (1997). *Pertanian Organik Sebagai Alternatif Teknologi dalam Pembangunan Pertanian*. Diskusi Panel Tentang Pertanian Organik. DPD HKTI Jawa Barat, Lembang 1996.
- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Salah 1996. *Management Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Pramita. Alih Bahasa: Fans Gromang

Yoeti, Oka, A. Edisi Revisi 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung

Yoeti, Oka, A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradaya Pratama, Jakarta.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Widjaja, AW. 2003. *Otonomi Desa, merupakan otonomi asli, bulat dan utuh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 10 Th. 2009 Tentang Kepariwisataaan

Jurnal

Maksudin. (2001). *Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. *Aplikasia*, Jumal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197-211

Zakaria, Faris dan R. D. Suprihardjo. 2014. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Teknik Pomits*. 3(2): 245-249.

Makalah dan Sejenis

Nuryanti, Wiendhu. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hal. 2-3

Artikel dari Internet

Kecamatan Wonosari Dalam Angka 2016

https://bondowosokab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Wonosari-Dalam-Angka-2016.pdf[03januari2017]

Statistik Daerah Kecamatan Wonosari 2016

https://bondowosokab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Wonosari-2016.pdf[03januari2017]

Bondowoso Kembangkan Organik. 2014.

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/kiprah-daerah/1214>[06juni2016]

Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, Bondowoso Regency In Figure 2015. 2015.

<https://bondowosokab.bpd.go.id>[20juni2016]

Otonomi Desa

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil1%20\(02-27-13-12-33-56\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil1%20(02-27-13-12-33-56).pdf)[12oktober2016]

Eni, H. 2012. *Potensi Desa dan Kaitnya dengan Perkembangan Desa dan Kota.*

<http://www.sselajar.net/2012/12/potensi-desa-dan-perkembangan-desa-kota.html>. Diakses pada 17 Februari 2017

Wisata Edukasi

id.m.wikipedia.org/wiki/Wisata_Pendidikan

Konsep Pertanian Organik

<http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-teknologi/753-konsep-pertanian-organik>